

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk sekitar 269.603.400 jiwa yang tersebar di berbagai daerah. Dengan penduduk dan sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki kompleksitas terhadap urusan pemerintahan. Jumlah penduduk merupakan salah satu proksi dari kompleksitas pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam bentuk akuntabilitas publik mengenai pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial untuk memenuhi hak-hak publik. Pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola pemerintahan belum cukup untuk meratakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memaksimalkan kegiatan pemerintahan dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki peranan khusus pada pengalihan urusan pemerintah pusat ke daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai kelompok yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan semua kegiatan di pemerintah. Pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan masing-masing daerah. Bagian penting dari pemerintah Indonesia ialah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal ini berkaitan dengan sistem keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban atas keuangan dan audit.

Pada pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mewujudkan tata kelola yang baik. Salah satu perwujudan tata kelola yang baik dalam penyajian laporan keuangan harus bersifat transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna informasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah

wajib membuat dan mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ialah pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan dasar penting saat menyusun laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan wajar dan mengungkapkan secara keseluruhan atas aktivitas keuangan pemerintah, sumber daya ekonomi yang digunakan dan menyatakan kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan pengawasan terhadap setiap kegiatan khususnya dalam hal keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya mencakup Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pihak utama yang membutuhkan laporan keuangan yaitu pihak di luar instansi pemerintah yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, mengukur akuntabilitas serta membentuk sebuah keputusan. Sedangkan bagi instansi pemerintah, informasi keuangan diperlukan bagi manajemen pemerintah daerah (Mantau, 2020).

Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan pengawasan terhadap penyajian laporan. Oleh sebab itu, penyajian laporan wajib mengungkapkan secara penuh atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Pengungkapan yang disajikan mencakup pos-pos pada setiap lembar

muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan kebutuhan dari pengguna informasi keuangan. CaLK mencakup penjelasan naratif atau rincian angka yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Laporan Arus Kas. Selain itu, CaLK juga memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi dan informasi lain yang wajib dan direkomendasikan untuk diungkapkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan yang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan dengan wajar.

Pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran pemerintah daerah, ukuran badan legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan lain sebagainya. Penelitian Hilmi dan Martani (2012) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan menjelaskan bahwa kekayaan daerah, tingkat penyimpangan dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan pada tingkat ketergantungan, total aset, jumlah temuan audit dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak ada pengaruh secara signifikan pada pengungkapan laporan keuangan. Dalam penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menjelaskan bahwa ukuran daerah (*size*), jumlah SKPD dan status daerah tidak berpengaruh pada pengungkapan akuntansi wajib. Hasil penelitian Maulana dan Handayani (2015) juga menyatakan bahwa ukuran pemda, ukuran badan legislatif memberikan pengaruh yang signifikan pada pengungkapan LKPD. Sedangkan kemandirian daerah, *intergovernmental revenue*, jumlah SKPD dan temuan audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada pengungkapan LKPD.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan adanya 4 (empat) variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan LKPD antara lain ukuran badan legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan daerah dan *intergovernmental revenue*. Variabel ukuran pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan hutang dan rasio kemandirian keuangan daerah terbukti tidak berpengaruh pada pengungkapan LKPD.

Adanya hasil tidak konsisten pada penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, praktik akuntansi sektor publik yang dilakukan pemerintah mendapat perhatian lebih daripada masa sebelumnya. Salah satu buktinya yaitu Pemerintah Kota Madiun yang mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi daerah yang berhasil pertama mengumpulkan penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2020. BPK juga mengharapkan Pemerintah Kota Madiun bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga bisa menjadi perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, faktor-faktor yang ada dalam pemerintah daerah pada umumnya memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja pemerintahan daerah berdasarkan keuangan adalah dengan mengevaluasi hal-hal atau faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Pemerintahan yang semakin kompleks dalam melakukan kegiatan akan mendorong tingkat pengungkapan yang lebih besar untuk dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjelaskan kekayaan daerah. Peneliti menambahkan satu variabel tingkat penyimpangan sebagai temuan yang merugikan daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Maulana dan Handayani (2015) dengan wilayah yang berbeda. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu pemerintah daerah di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun dengan periode tahun anggaran 2016 hingga 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah ukuran pemerintah daerah memberikan pengaruh dalam pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?

- b. Apakah tingkat kemandirian daerah memberikan pengaruh dalam pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?
- c. Apakah *intergovernmental revenue* memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?
- d. Apakah jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?
- e. Apakah ukuran legislatif memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?
- f. Apakah temuan audit daerah memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?
- g. Apakah tingkat penyimpangan memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan secara empiris :

- a. Ukuran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang positif dalam pengungkapan LKPD.
- b. Tingkat kemandirian dapat memberikan pengaruh yang positif dalam pengungkapan LKPD.
- c. *Intergovernmental revenue* dapat memberikan pengaruh yang positif pada pengungkapan LKPD.
- d. Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat memberikan pengaruh yang positif pada pengungkapan LKPD.
- e. Ukuran legislatif dapat memberikan pengaruh yang positif pada pengungkapan LKPD.
- f. Temuan audit daerah dapat memberikan pengaruh yang positif pada pengungkapan LKPD.
- g. Tingkat penyimpangan daerah dapat memberikan pengaruh yang positif pada pengungkapan LKPD.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil riset ini dapat dipakai untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, penilaian kerja dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapan LKPD.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi desain penelitian, populasi, sampel serta teknik pengambilan sampel; identifikasi penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran dari objek yang diteliti, penjelasan mengenai data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran.